

**LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
PERIODE FEBRUARI 2015
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**

No	Hari/Tanggal/ Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil dan Keputusan	Tindak Lanjut
I. KERJASAMA BILATERAL					
1.	Tanggal 2 Pebruari 2015, di Badan Litbang Pertanian	Kunjungan Delegasi Pertanian Provinsi Shandong ke Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Badan Litbang Pertanian • Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian • Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian • Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian • Sekretariat Ditjen PPHP • Direktorat Alat dan Mesin Pertanian • Direktorat Pemasaran Internasional • Direktorat 	<p>1. Ketua Delegasi Provinsi Shandong memberikan paparan mengenai “<i>Shandong Agricultural Machinery</i>”. Provinsi Shandong merupakan provinsi terbesar di RRT untuk sumber daya alam dan minyak bumi. serta termasuk peringkat pertama dalam volume transaksi pertanian. Pada tahun 2013, Provinsi Shandong telah memproduksi 860 ribu unit traktor dan 870 ribu unit mesin panen,</p> <p>2. Beberapa perwakilan dari perusahaan Provinsi Shandong, diantaranya:</p> <p>a. Shandong Huayun Laidong Engine Co., Ltd Produsen mesin diesel kecil dan menengah. Kapasitas produksi perusahaan ini lebih dari 400 ribu per tahun.</p> <p>b. Shandong Wuzheng (Group) Co., Ltd Produsen mesin untuk komoditas tembakau, mulai dari penanaman, panen sampai <i>processingnya</i>. Selain itu terdapat pula serangkaian produk untuk pengelolaan sampah di daerah perkotaan.</p> <p>c. Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd Produsen terbesar untuk kendaraan tenaga listrik, traktor dan mesin diesel. Sejak tahun 2006, produk mesin diesel dari perusahaan ini sangat laku di pasar Indonesia. Perusahaan ini berharap dapat mendapatkan mitra</p>	Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, pihak China akan mengirimkan undangan kepada Kementerian Pertanian RI untuk hadir dalam “ <i>Shandong-ASEAN Agricultural Machinery Cooperation Conference</i> ” yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Shandong.

			<p>Pengembangan Usaha dan Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kerja Sama Luar Negeri • KADIN 	<p>perdagangan dalam pendistribusian traktor dan kendaraan listrik di Indonesia</p> <p>d. Rizhao Rui Energy Trading Co., Ltd Perusahaan perdagangan Internasional yang fokus pada biji besi, batubara, tapioka dan bahan baku kimia lainnya. Perusahaan ini sedang mencari mitra perdagangan mengenai <i>cassava chips</i>, <i>tapioca chips</i> dan turunan produk ubi kayu lainnya, serta buah-buahan tropis yang dapat dipromosikan ke China</p> <p>e. Shandong Source Machinery Co., Ltd Perusahaan pengelola tembakau, mulai dari pembibitan, penanaman, penyemprotan, panen, dan <i>processing</i> pasca panen, dengan menggunakan mesin khusus tembakau dan mesin pertanian lainnya. Mesin khusus tembakau ini pun dapat digunakan untuk tanaman lainnya termasuk kelapa sawit.</p> <p>3. Saat ini, Kementerian Pertanian sedang konsentrasi pada swasembada pangan, seperti: beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai, bawang merah dan kentang. Salah satu prioritas dalam mengembangkan pertanian Indonesia adalah penggunaan mesin pertanian dan Indonesia pun telah memiliki produk mesin pertanian sendiri.</p> <p>4. Dalam rangka pengembangan usaha pertanian Indonesia, diharapkan pihak China tidak hanya mengirimkan produk-produk mesin pertanian secara langsung, namun termasuk <i>assembling</i> yang dapat dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, maka komposisi bahan baku lainnya pun akan masuk ke Indonesia sehingga produk China tersebut dapat menjadi bagian dari produk Indonesia dengan Standar Nasional Indonesia.</p> <p>5. Perwakilan dari KADIN menyampaikan bahwa Indonesia</p>	
--	--	--	---	--	--

				memiliki kelompok Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) dan memiliki rencana untuk mengembangkan produk tersebut dengan jumlah lahan 300 ha. Diharapkan China dapat bekerja sama dalam membuat <i>pilot project</i> tersebut.	
2.	Tanggal 3 Februari 2015, Sekretariat, Badan Litbang Pertanian	Kunjungan Prof. Katsuya Fukami dari Kyushu University ke Balitbangtan dalam rangka kerjasama pertukaran Sumberdaya Genetik.	Puslitbanghorti Universitas Kyushu, Jepang, Balitbu, BB Biogen, Puslitbang Tanaman Pangan, Balittas dan Pusat KLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana MoU antara Badan Litbang Pertanian dengan Kyushu University, pengajuan kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian khususnya mengenai potensi tanaman umbi – umbian sebagai pangan fungsional serta endiskusikan tentang Material Transfer Agreement (MTA) untuk bahan Umbi – Umbian yang digunakan pada penelitian Dr. Muchdar Soedardjo (peneliti Balittas) di Kyushu University. 2. Terkait MoU, saran dari Pusat KLN adalah mengingat belum ada MoU antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (Government to University), khususnya menyangkut pertukaran SDG, maka kerjasama pertukaran SDG memerlukan payung hukum formal. Untuk itu kerjasama dimaksud diangkat menjadi salah satu topik pada pertemuan antar Wakil Menteri Pertanian kedua Negara pada bulan April 2014 yang menghasilkan Record of Discussion (RoD), dimana RoD tersebut menjadi payung hukum formal untuk kerjasama Kyushu dan Puslitbang Hortikultura. 	Lebih lanjut di dalam penyusunan MTA diperlukan dokumen pemberitahuan atas dasar informasi awal/Prior inform concern (PIC), yang prosedurnya sedang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Tanggal 11 Pebruari 2015, Kanpus Kementerian Pertanian, Jakarta	Rapat pembahasan <i>draft Agreement on Scientific and Technical Cooperation</i> RI-Meksiko dan	Kemenlu, Sesdit Tanaman Pangan, Sesdit Hortikultura, Sesdit Nakeswan, Sesdit Perkebunan, Sesdit PSP, Ses Badan Litbang, Ses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa hasil kesepakatan rapat terkait <i>draft Agreement on Scientific and Technical Cooperation</i> RI-Meksiko adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan nomenklatur perjanjian dari <i>agreement</i> menjadi <i>technical agreement</i> atau <i>technical arrangement</i> mengacu pada Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman 	Pusat KLN akan meminta masukan secara tertulis atas draft agreement RI-Meksiko kepada eselon teknis terkait dan selanjutnya menyampaikan <i>counter</i>

		draft MOU RI-Afganistan	BPPSDMP, Sesba Karantina, Ditjen PPHP, Biro Hukum dan IP, Puslitbang Perkebunan, Puslitbang Hortikultura	<p>Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>b. Perubahan pada paragraph pembukaan dan <i>article-article</i> di dalam perjanjian sesuai dengan masukan dari Direktorat Perjanjian Ekososbud Kemenlu</p> <p>3. Kesepakatan terkait draft MOU bidang pertanian RI-Afganistan yaitu penambahan terkait pasal <i>financial arrangement</i> yang mana dapat memanfaatkan pihak ketiga dalam pendanaan kegiatan di bawah payung MoU tersebut.</p>	<p><i>draft</i> kepada Kemenlu.</p> <p>Pusat KLN akan menyampaikan counter draft MOU bidang pertanian RI-Afganistan kepada pihak Kemlu.</p>
4.	Tanggal 20-21 Februari 2015/ BB Biogen Bogor	Rapat Penyusunan Bahan Kerja Sama Dengan Negara Mitra di Kawasan Amerika Dan Eropa	<p>Pusat KLN, FEM IPB, PSEKP, serta beberapa direktorat dari Kementerian Luar Negeri diantaranya Direktorat Amerika utara dan Tengah, Direktorat Amerika Selatan dan Karibia, Direktorat Eropa Barat, Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Direktorat Afrika, Direktorat Timur Tengah, Direktorat Asia Timur dan Pasifik serta Direktorat Asia Tengah dan Selatan.</p>	<p>Tujuan rapat adalah untuk merumuskan n bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan buku untuk kawasan Amerika dan Eropa yang akan dilanjutkan dengan kawasan Asia Pasifik dan Afrika Timur Tengah.</p> <p>FEM IPB menjelaskan tentang perkembangan rencana penyusunan buku yang dimulai dengan penjelasan tentang: tujuan perjanjian bilateral dan kerangka pikir dari buku yang disusun, gambaran umum Perkembangan ekspor dan Impor Indonesia dengan Negara mitra dagang, Status FDI (<i>Foreign Direct Investment</i>), Potensi dan peluang kerja sama, Komoditi potensial ekspor, Kondisi makro per Negara. Neraca perdagangan dsb.</p> <p>Masing-masing peserta memberikan masukan demi kesempurnaan buku dimaksud diantaranya tentang potensi kerja sama bidang pertanian, investasi, ekspor impor serta aspek politis dan budaya yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian.</p> <p>Prof. Tahlim dari PSEKP menjelaskan bahwa banyak lahan</p>	<p>Data yang dikumpulkan sudah cukup banyak namun belum ada penjelasan tentang kebijakan, status terkini dan peluang pengembangan ke depan. Hal ini perlu mendapat masukan dari pihak terkait terutama Kemlu. Apabila diperlukan Pusat KLN akan mengirimkan surat resmi perihal permintaan informasi dimaksud kepada KBRI di negara mitra melalui Kemlu.</p>

				yang belum dimanfaatkan namun pada kenyataannya tidak dapat digunakan. Masukan lainnya yaitu tentang <i>update policy development</i> , partisipasi aktif Indonesia untuk pembanguna pertanian Negara berkembang, koherensi kebijakan serta upaya untuk mendorong peran swasta untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu perlu ditambahkan <i>best policy practices</i> di Negara yang sudah maju seperti kebijakan Brazil dalam pengembangan bioethanol.	
5.	Tanggal 23 Pebruari 2015, di Kementerian Pertanian	Pertemuan dengan <i>JICA Mission Team</i> dari Tokyo	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Ketahanan Pangan • Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian • Ditjen PPHP • Ditjen Hortikultura • Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan • Ditjen Tanaman Pangan • Pusat Kerja Sama Luar Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pertemuan adalah untuk berdiskusimengenai kebijakan pengembangan pertanian di Indonesia yang berhubungan dengan ketahanan pangan. 2. Pimpinan rapat menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Kementerian Pertanian memiliki visi yaitu membentuk sistem pertanian bio-industri berkelanjutan yang menghasilkan diversifikasi pangan dan produk pertanian yang bernilai tinggi serta berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 3. Adapun target strategis Kementerian Pertanian adalah swasembada padi, jagung, dan kedelai sekaligus peningkatan produksi daging dan gula; peningkatan nilai tambah, daya saing, subsidi ekspor dan impor; penyediaan bahan baku untuk bio-industri dan bio-energi; serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Permasalahan utama dalam pengembangan pertanian yang dihadapi diantaranya adalah lahan pertanian, infrastruktur, peraturan (perijinan), sumber daya manusia, dan keuangan. 4. Diharapkan dalam pertemuan ini Pemerintah Jepang dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian target swasembada pangan tersebut. 5. Perwakilan dari JICA menyampaikan pentingnya perluasan 	Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, pihak China akan mengirimkan undangan kepada Kementerian Pertanian RI untuk hadir dalam “ <i>Shandong-ASEAN Agricultural Machinery Cooperation Conference</i> ” yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Shandong.

				<p>jaringan irigasi. Saat ini JICA memiliki <i>project</i> diantaranya adalah <i>Public Private Partnership</i> untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat 3 jenis bantuan yang dapat diberikan oleh JICA yaitu berupa <i>technical assistance, grant, dan loan</i>. Disampaikan pula bahwa tahun 2015, JICA mengharapkan agar Kementan dapat menyampaikan proposal baru sebelum akhir bulan April 2015.</p> <p>6. Wakil BKP menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah terus berupaya melaksanakan diversifikasi pangan yaitu mendorong diversifikasi konsumsi dan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).</p> <p>7. Wakil Ditjen PKH Hewan menyampaikan bahwa saat ini terdapat program JICA yang masih perlu dibahas lebih lanjut, yaitu: Perbaikan manajemen pembibitan ternak sapi potong di UPT Perbibitan; <i>Capacity building</i> untuk penguatan sistem keamanan pakan ternak (<i>feed safety</i>); Identifikasi dan <i>traceability</i> ternak kambing dan domba di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur; serta <i>Capacity building</i> untuk penanganan penyakit hewan.</p> <p>8. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa bantuan dari JICA tidak memiliki masalah sepanjang sejalan dengan program Indonesia dalam rangka pencapaian ketahanan pangan.</p>	
6.	Tanggal 23 Pebruari 2015 / Bandung	Menghadiri Konsolidasi Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Kawasan Negara-negara Eropa Tengah	Kementerian/ Lembaga Terkait	<p>1. kegiatan dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu: 1) Overview Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Kawasan Eropa Tengah dan Timur, 2) Peluang dan Tantangan Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, dan 3) Pembahasan Perjanjian <i>Pending</i> antara Indonesia dengan Negara-negara Eropa Tengah dan Timur dibidang Ekonomi.</p>	Pusat KLN akan segera menyampaikan <i>counterdraft</i> ke Kemlu setelah menerima masukan dari masing-masing unit eselon I Kemtan.

		dan Timur.	<p>2. Untuk peluang sektor pertanian yang dapat dikerjasamakan dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rusia: Membuka peluang pasar untuk produk pangan dan pertanian seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan. • Belarus: Peluang pasar untuk karet dan seafood Hongaria: Kerja sama pengelolaan sumberdaya air • Serbia: Tawaran kerja sama lembaga riset penelitian pertanian dan pendirian pabrik gula di Indonesia • Polandia Keinginan untuk investasi perusahaan produsen ayam olahan (konspol) sebesar 10-20 juta Euro Bosnia dan Herzegovina Kerja sama industri pertanian dan makanan olahan • Ceko: Kerja sama teh dan kopi. <p>3. Kertan melalui penyusunan buku panduan potensi pertanian dengan negara-negara mitra.. Disamping itu Pusat KLN juga akan mengadakan <i>diplomatic tour</i> bagi perwakilan RI untuk lebih mengenal potensi-potensi pertanian di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI yang mengharapkan Diplomat sebagai Sales dan <i>Marketer</i> produk Indonesia</p> <p>4. <i>Diplomatic Tour</i> sebaiknya dilakukan pada bulan April dan Oktober yang mana pada waktu tersebut dilaksanakan pembekalan bagi diplomat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI. Disamping menghemat biaya juga memudahkan bagi Kemlu untuk menugaskan para diplomat.</p> <p>5. Perjanjian kerja sama bidang pertanian yang sedang dalam tahap komunikasi antara Kementerian Pertanian RI</p>	
--	--	------------	--	--

				<p>dengan Kementerian Pertanian negara mitra yaitu:</p> <p>RI – Ukraina: <u>MOU bidang Pertanian</u> Pihak Ukraina menghapus pasal mengenai IPR dan GRTK. Kemtan akan tetap mempertahankan pasal mengenai IPR dan GRTK karena ruang lingkup kerja sama terdapat <i>joint research</i></p> <p><u>Agreement antara Badan Karantina Pertanian, Kemtan RI dan Karantina Ukraina</u> <i>Counterdraft Agreement</i> akan segera disampaikan oleh Pusat KLN ke pihak Ukraina.</p> <p>RI – Rusia: <i>Agreement</i> antara Badan Litbang Pertanian dengan RASS (<i>Russian Academy of Agricultural Science</i>) Saat ini posisi perjanjian kerja sama tersebut telah siap untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun Pusat KLN mengingankan agar dibentuk terlebih dahulu MOU antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Rusia. Kemlu mengusulkan agar Kemtan dapat menyampaikan secara lisan terkait permintaan masukan dimaksud.</p> <p>RI – Romania: Posisi draft MOU dimaksud berada pada pihak Romania.</p>	
7.	Tanggal 23 Februari 2015 / Bandung	Menghadiri Lokakarya Mapping Prioritas Negara Penerima		Tujuan Lokakarya adalah untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan mendorong Kementerian/Lembaga untuk dapat mengalokasikan/me-relokasikan anggaran kegiatan KSST yang ada untuk menentukan target negara calon penerima bantuan sebagai	Guna lebih memfokuskan kelayakan prioritas tersebut akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi dengan

		Bantuan Teknik Tahun Anggaran 2016		<p>prioritas.</p> <p>Lokakarya dibagi dalam 4 sesi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 2. Indikator Negara Penerima Bantuan 3. Potensi, Peluang dan Kondisi Negara Prioritas Calon Penerima Bantuan 4. Potensi, Peluang dan Kondisi Negara Prioritas Calon Penerima Bantuan <p>Diuraikan melalui pembobotan pada 3 skala prioritas yaitu: ekonomi, politik dan sosial budaya dengan indikator yang telah disusun oleh Kemlu. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut maka telah diperoleh 42 negara yang menjadi prioritas penerima bantuan pengembangan kapasitas dalam kerangka KSST.</p>	<p>melibatkan Tim Pelaksana Koordinasi nasional Pengembangan KSST beserta Kementerian/Lembaga terkait.</p>
8.	Tanggal 23-25 Pebruari 2015, Di Yogyakarta	Koordinasi Potensi Kerjasama Bilateral Daerah dengan Negara Mitra	Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan identifikasi potensi pertanian daerah sebagai dasar penyusunan program kerja sama yang akan ditawarkan kepada negara mitra. 2. Potensi pertanian di Yogyakarta adalah padi, palawija, dan hortikultura. Sedangkan perkebunan umumnya merupakan perkebunan rakyat dan perkebunan BUMN dengan komoditas utama kopi, kelapa, tembakau, jambu mete, kapuk randu, lada, kakao, cengkeh, dan sebagainya. 3. Komoditi Pertanian DI. Yogyakarta yang telah diekspor ke Mancanegara antara lain salak pondoh dan manggis. Negara tujuan ekspor salak tersebut adalah China dan Singapura. Saat ini telah dilakukan peninjauan untuk mengeksport Kambing PE ke luar negeri. Adapun sentra 	

				<p>produksi salak di Provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman, dan sentra produksi manggis adalah Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>4. Fokus program dan kegiatan pengembangan komoditi pertanian tahun 2015 di Provinsi DIY yaitu :</p> <p>a. Kabupaten Kulonprogo: bawang merah, biofarmaka, cabe, krisan, kambing PE dan durian</p> <p>b. Kabupaten Bantul : bawang merah, biofarmaka, pisang, cabe, jamur, kambing bligon dan itik</p> <p>c. Kabupaten Sleman : salak, sapi perah, krisan, jamur dan kambing PE</p> <p>d. Kabupaten Gunungkidul : ubi kayu, durian, jambu kristal, kambing, bligon dan ayam buras.</p>	
9.	Tanggal 24 Februari 2015 / Kementerian Luar Negeri	Seminar Refleksi 20 Tahun Implementasi <i>Beijing Platform for Action</i> Di Indonesia	dihadiri oleh kurang lebih 125 undangan yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, <i>National Human Rights Institutions</i> , DPR, DPD, berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga <i>think tank</i> , Pusat Studi Gender/Wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi internasional dan media.	<p>1. Seminar membahas <i>Beijing Platform for Action</i> (BPfA) yang diadopsi pada <i>the Fourth World Conference on Women</i> tahun 1995 di Beijing, Tiongkok yang menjadi rujukan utama bagi penyusunan kebijakan dan aksi guna mewujudkan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>2. Tujuan: untuk meningkatkan pemahaman mulai dari konteks sejarah yang melatarbelakangi diadopsinya BPfA, hingga informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia selama 20 tahun terakhir. Serta Mengidentifikasi capaian dan hambatan serta upaya yang dapat ditingkatkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara penuh.</p> <p>3. Sesi pembukaan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Sesi gelar wicara (<i>talk show</i>) dan tanya jawab dengan topik:</p> <p>- Sejarah <i>Beijing Platform for Action</i> (BPfA)</p>	Hasil seminar ini akan digunakan sebagai bahan dan posisi pada sidang sesi ke-59 <i>Commission on the Status of Women</i> PBB yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-20 Maret 2015 di New York.

				<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. - Perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi - Peraturan perundang-undangan responsif gender. 	
10.	Tanggal 25 Februari 2015/ Kementerian Luar Negeri	Pembahasan Program EPT-2 dan OH-SMART	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, Kemenkes, Kementan, Kemenristek, Pusat Studi Satwa Primata IPB dan Kemenlu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan untuk membahas dan menentukan beberapa hal yang mencakup perumusan posisi Indonesia atas program EPT-2 dan OH-SMART yang dimana IPB dan asosiasi lainnya telah mendahului mendapatkan hibah bantuan dari luar negeri. 2. Secara umum pimpinan rapat memaparkan bahwa program EPT-2 dan OH-SMART tidak ada keterkaitannya dengan negara karena bantuan tersebut langsung tertuju ke lembaga non pemerintah yaitu IPB. Adapun kegiatan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan namun tetap harus dalam pengawasan. Kemenlu akan bertindak tegas jika ada intervensi luar tanpa adanya ijin resmi. 3. Menanggapi keinginan IPB untuk melibatkan Negara perlu dibuat kesepakatan baru sehingga banyak hal hal yang musti diterapkan untuk secara diplomasinya secara hukum Negara 	Pusat KLN akan memantau kelanjutan dari kegiatan dimaksud dan meminta laporan hasil monitoring dan evaluasinya.
11.	Tanggal 24-26 Februari 2015 / Yogyakarta	Persiapan pelaksanaan seminar metodologi ilmiah pengukuran dampak kegiatan pemanfaatan CF-SKR	Pusat KLN, STPP	Sebagai persiapan pelaksanaan seminar metodologi ilmiah pengukuran dampak kegiatan pemanfaatan CF-SKR yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2015 di Yogyakarta, Pusat KLN mengadakan kunjungan ke lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk tempat pelaksanaan seminar. Setelah mempertimbangkan jarak lokasi dan kesiapan tempat, diputuskan tempat seminar akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta	Pusat KLN akan mengadakan rapar persiapan pada tanggal 27 Februari 2014 dengan mengundang nara sumber dan instansi terkait.

12.	Tanggal 25 Februari 2015 / Hotel Ritz Carlton	Menghadiri the 54 th National Day dan 24 th Liberation Day Kuwait	Kementerian dan Lembaga terkait.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewakili Pemerintah RI memberikan sambutan serta mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kuwait atas perayaan dua hari bersejarahnya. Pemerintah Indonesia sangat bangga bisa menjadi bagian dari hari bersejarah dimaksud. Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengharapkan hubungan kerja sama ke depan lebih terbuka dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sesama negara muslim.	
13.	Tanggal 25 – 27 Februari 2015 / Sumatera Utara	Koordinasi potensi kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian dengan negara mitra	Pusat KLN, Dinas Pertanian Tapanuli Tengah	<p>Pertemuan ini bertujuan untuk menggali potensi pertanian di Provinsi Sumatera Utara khususnya Tapanuli Tengah. Tim dari Pusat KLN diterima oleh Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> <p>Adapun keterbatasan yang melingkupi persoalan tersebut adalah Topografi wilayah Tapanuli Tengah yang berbukit (Bukit Barisan), keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur, n akses informasi dan keterbatasan arus modal.</p> <p>Masyarakat petani terdiri atas nelayan, petani yang menanam padi, hortikultura dan ternak serta perkebunan rakyat. Lapangan usaha jasa yang dominan merupakan aktifitas perdagangan komoditi unggulan hasil pertanian dan produk kerajinan / industri rumah tangga, disamping jasa lainnya seperti pengangkutan, komunikasi dan perbankan / lembaga keuangan. Industri pengolahan meliputi industri yang berbasis hasil perikanan tangkap dan perkebunan.</p> <p>Produksi tanaman Padi Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar 143.121 ton yang terdiri atas Padi Sawah 136.686 ton dan</p>	Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memotivasi mengingat kondisi masyarakat yang cenderung pasif dalam membangun sektor pertanian di wilayah Tapanuli Tengah

				Padi Ladang 6.435 ton. Sementara komoditas unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah ada di sektor perkebunan seperti Karet, Kelapa Sawit, kakao dan Kelapa.	
14.	Tanggal 27 Pebruari 2015, Pusat KLN	Rapat Persiapan <i>World Expo Milano 2015</i>	SAM bidang Lingkungan, Kemendag; Kemenko bidang Kemaritiman; Koperasi Pelestari Budaya Nusantara; Ditjen PPHP; Ditjen. Tanaman Pangan, Ditjen. Hortikultura, Ditjen. PKH. Ditjen. Perkebunan, Ditjen. PSP, Badan Litbang Pertanian, BPPSDMP, BKP, Barantan, Biro Hukum dan Informasi Publik,	<p>1. Tujuan Rapat adalah untuk membahas dukungan konkret serta penjadwalan partisipasi Kementan dalam pameran tersebut.</p> <p>2. Rapat menyepakati beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat KLN akan menjadi Koordinator sektor pertanian dan sekaligus sebagai <i>focal point</i> untuk berkomunikasi secara aktif dengan Koordinator Nasional dalam mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada World Expo Milano. - Pameran akan difokuskan pada komoditas kelapa sawit, kopi, buah-buahan tropis Indonesia dan program penguatan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, format partisipasi Kementerian Pertanian akan berupa (i) <i>business meeting</i>, (ii) <i>display</i> dan <i>video promotion</i>, (iii) <i>free taste</i> produk pertanian, dan <i>culture performance</i>. - Jadwal keikutsertaan Kementerian Pertanian direncanakan paling sedikit 6 (enam) hari, dan waktunya diselaraskan dengan pelaksanaan <i>FAO Conference</i> pada tanggal 8-16 Juni 2015, dimana Presiden RI bersama Menteri Pertanian RI direncanakan akan hadir pada pertemuan tersebut. 	
15.	Tanggal 27 Februari 2015 / Pusat KLN	Rapat dalam rangka pelaksanaan seminar metodologi ilmiah pengukuran	Bappenas, Kemnkeu, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, Ditjen PKH, Ditjen Hortikulturam Ditjen Perkebunan, Biro	<p>Rapat bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan seminar metodologi ilmiah pengukuran dampak kegiatan pemanfaatan CF-SKR yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2015 di Yogyakarta.</p> <p>Pusat KLN menjelaskan hasil survey persiapan yang telah dilakukan pada tanggal 24-16 Februari 2015 di Yogyakarta.</p>	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan kegiatan seminar.

		dampak kegiatan pemanfaatan CF-SKR	KP, PPSDMP, PPHP	Badan Ditjen	Sekretarian SKR akan mengidentifikasi 56 proyek/kegiatan yang telah dilaksanakan.	
II. KERJASAMA REGIONAL						
1.	Tanggal 8 Januari 2015/ Ditjen. PPHP	Rapat <i>First Draft Asean Food Safety Policy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Eselon I teknis Lingkup Kemtan • Pusat KLN 		Rapat ini diadakan oleh Direktorat Mutu dan Standarisasi, Ditjen PPHP dan ditujukan untuk membahas draft pertama ASEAN Food Safety Policy. Pada dasarnya Indonesia setuju dengan draft dimaksud, namun ada beberapa pengurangan yang dirasa akan merugikan AMS terutama Indonesia. Untuk itu mengusulkan masukan khususnya pada paragraph kedua dari Principle 7: Harmonisation with International standards, Member States food safety authorities should actively participate in setting up international food standards, guidelines and recommendations to ensure in that the concerns of the region are well adopted.	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN telah menyampaikan matriks masukan/tanggapan terhadap <i>First Draft Asean Food Safety Policy</i> pada ASEC
2.	Tanggal 9 Januari 2015/ Ditjen. PPHP	Rapat Posisi DELRI pada pertemuan <i>The 19th EWG-MRLs</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan POM • Kemdag • Badan Karantina Pertanian • Dit. Perkebunan • Pusat KLN 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dilaksanakan oleh Direktorat Mutu dan Standarisasi, Ditjen PPHP. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas matriks posisi DELRI untuk persiapan pertemuan <i>The 19th EWG-MRLs</i>. 2. Rapat menyepakati bahwa Indonesia hanya akan memberikan informasi secara umum tentang penggunaan beberapa bahan aktif (buprofezin, namun bukan pada tanaman pete, Indonesia menggunakannya pada 4 komoditi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menindaklanjuti agenda 7 Indonesia akan berkoordinasi dengan BSN untuk merevisi SNI BMR; • Dari 768 MRLs yang Indonesia adopt

				<p>yaitu cabai, padi, kedelai, dan teh);</p> <p>3. Pada dasarnya Indonesia setuju dengan pengajuan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh beberapa AMS. Pada kesempatan ini Indonesia tetap;</p> <p>4. Proposal Indonesia terkait Azoxystrobin pada melon kecuali watermelon masih <i>on-going</i> karena mengalami kesulitan di musim hujan, sehingga Indonesia belum bisa memberikan laporannya, percobaan tersebut akan selesai pada bulan Februari 2015.</p>	<p>sudah mencapai 80% yakni 668 MRLs (per Januari 2013), MRLs yang belum dapat diadopsi oleh Indonesia dikarenakan belum merupakan MRLs yang urgent untuk diadopsi, (tidak menggunakan bahan tersebut pada seluruh komoditi yang ada di Indonesia)</p>
3.	Tanggal 14 Januari 2015/ BKPM	Rapat Persiapan <i>The 65th Meeting of ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemdag • Kemlu • Kemhut • KKP • Dit. Hortikultura • Pusat KLN 	<p>1. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas persiapan pertemuan CCI ke-65;</p> <p>2. Indonesia tidak mengakui status <i>Permanent Resident</i>. Hal ini sesuai dengan UU Penanaman Modal No. 25/ Tahun 2007, dimana penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;</p> <p>3. Pada UU baru Hortikultura ada pembatasan investasi asing, dampak dalam bidang perbenihan dan sarana pertanian, sedang ratifikasi PP maupun Permen, untuk proses divestasinya, seharusnya sudah diterbitkan November 2014 namun hingga saat ini belum terlaksana. Selanjutnya, diinformasikan bahwa turunan dari UU 13/ Tahun 2010 adalah Permentan No 70/ Tahun 2014 (terkait prosedur penanaman modal produk hortikultura). Dari UU 13/ Tahun 2010 (Pasal 100 ayat 3) tersebut terdapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pertemuan ke-66 CCI, Indonesia akan mengusulkan untuk menjadi tuan rumah, yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli/Agustus 2015, di Sumatera Selatan

				banyak tanggapan dari pengusaha asing, mengenai pembatasan kepemilikan saham penanaman modal asing sebesar 30%, hal ini menimbulkan permasalahan dan isu tersebut telah diangkat ke Mahkamah Konstitusi oleh pengusaha-pengusaha asing, namun sampai saat ini blm ada keputusan.	
4.	Tanggal 27-28 Januari 2015/ BPATP dan PSE-KP, Bogor	Koordinasi dan peninjauan Persiapan <i>Workshop AEC 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PSE-KP • BPATP • Pusat KLN 	Sesuai hasil sidang AMAF dan kesepakatan bersama antara Delegasi RI pada pertemuan tersebut, maka kami melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan <i>Forum Discussion Group (FGD)</i> Pemetaan Posisi Pertanian Indonesia Pasca AEC 2015 dan <i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Sumberdaya Pangan Pasca AEC 2015 <i>Challenge and Way Forward</i> ; salah satunya dengan Prof. Dr.Ir. Erizal Jamal, MSi, selaku Kepala Balai Pengelola Alih teknologi Pertanian, serta ke PSE-KP;	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kerja Sama Luar Negeri (Cq: Subbid. ASEAN) akan menyesuaikan TOR <i>Workshop</i>, dengan menambahkan isu-isu yang terdapat pada <i>Concept Draft Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (2016-2025)</i>; • Rapat persiapan pertama telah dilaksanakan 2 Februari 2015.
5.	Tanggal 4 Februari 2015, R. Rapat Biro OK	Rapat Persiapan Pertemuan COMCEC Agriculture Working Group	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN • HKTI • KTNA • Puslatan • Pusluhtan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan membahas persiapan Pertemuan COMCEC Agriculture WG ke-5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015. • Beberapa hal yang dibahas dalam rapat ini terkait tanggapan Indonesia terhadap studi analisis COMCEC mengenai penguatan kapasitas institusi: organisasi petani 	Delri yang akan menghadiri Pertemuan ini adalah Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

		ke-5		<p>di negara anggota OKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perwakilan HKTl menyampaikan HKTl dalam kapasitasnya di dunia internasional akan tetap mempertahankan kebersamaan dengan pemerintah. penguatan kelembagaan petani sudah merupakan bagian dari strategi pemerintah sejak dulu karena suksesnya swasembada merupakan keharusan dan pelaku utama dari organisasi petani bersifat bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pertanian. 	
6.	Tanggal 5 Februari 2015, Setbalitbang	Rapat Persiapan Sidang GC CAPSA ke-11	Pusat KLN PSE-KP Setbalitbang Puslitbangtan	<ul style="list-style-type: none"> Draft matriks posisi delri Draft pidato Mentan pada pembukaan <i>Policy Dialogue</i> (tgl 10 Februari 2015) dan pembukaan GC (tgl 12 Februari 2015) 	Penyusunan pedoman delegasi RI
7..	Tanggal 6 Februari 2015, Ditjen PPHP	Rapat Pembahasan Besaran Tarif Bea Masuk Produk <i>Live Cattle</i> Dalam Implementasi Persetujuan Asean Australia New Zealand FTA	<ul style="list-style-type: none"> Kemdag Kemlu Kemkeu Dit. PKH Biro Hukum dan Informasi Publik PSE-KP Pusat KLN 	<ol style="list-style-type: none"> Tujuan diselenggarakannya rapat ini adalah untuk membahas masalah tarif bea masuk produk <i>live cattle</i> dalam implementasi persetujuan Asean Australia New Zealand FTA (AANZFTA); Hasil transposisi Indonesia dalam PMK No. 208/2013 tersebut mendapat keberatan dari Australia karena terdapat 2 (dua) pos tarif produk Live Cattle (HS 0102.29.10.90 dan HS 0102.29.90.00) yang besaran tarifnya mengalami kenaikan dari 0% menjadi 5%; Australia berpandangan bahwa besaran tarif dari kedua pos tersebut seharusnya tetap 0%, agar sesuai dengan komitmen awal Indonesia dalam Persetujuan AANZFTA; Sebagai bahan pertimbangan adalah surat Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan (Desember 2014): <ul style="list-style-type: none"> Produk <i>Live Cattle</i> yang memiliki bea masuk nol % hanya untuk produk bibit. Selain itu, merujuk kepada tabel korelasi oleh WCO dan AHTN, besaran tarif 	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Pertanian (Cq: Ditjen. PPHP) akan bersurat kepada Menteri Perdagangan, dengan menyertakan data-data ekspor-impor sapi ke Australia dan New Zealand, dan menambahkan hasil dari keputusan pengadilan yang menyatakan tariff bea masuk untuk sapi sebesar 5%. Hasil ini sesuai dengan PMK

				<p>produk <i>live cattle</i> 0102.29.10.90 dan 0102.29.90.00 adalah 5%;</p> <p>– Terdapat 2 klasifikasi produk <i>live cattle</i> menurut perwakilan Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, yakni: Non bibit (sapi siap potong, sapi bakalan, dan sapi betina) dan bibit (<i>pure-bred breeding animal</i>).</p>	208 tahun 2013.
8.	Tanggal 6 Februari 2015, BKP	Rapat Posisi Indonesia terhadap IOFS	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN • BKP • Kemlu • BKF • Biro Perencanaan 	Indonesia tetap pada posisi Observer, karena belum ada manfaat secara langsung yang dirasakan oleh Indonesia dari pembentukan IOFS ini	Kemtan mengirimkan surat kepada Kemlu terkait tanggapan Indonesia terhadap IOFS ini.
9.	Tanggal 6 Februari 2015, di BBP2TP Bogor	Rapat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Bidang Pertanian	Bappenas, Kemlu, Eselon 2 Lingkup Kementerian Pertanian (BBIB Singosari, Sesditjen Nakeswan, Sekretaris Badan PPSDMP, Puslatan-BPPSDMP, BB Mektan, Biroren Kemtan, Biro Hukum dan Informasi Publik Setjen Kemtan), Bidang Bilateral PKLN, Bidang Multilateral PKLN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Draft Mou on Reverse Linkage Inseminasi Buatan antara Pemerintah Indonesia dengan Republik Kyrgyz dan Islamic Development Bank (IDB) 2. Pembahasan Rencana Kegiatan KSST Bidang Pertanian TA. 2015-2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft MoU akan difinalisasi dan dikirimkan kepada pihak IDB. 2. Terkait dengan matriks rencana kegiatan 2015-2019 Kemtan menyampaikan masukan kepada Bappenas melalui Biroren untuk bahan rapat trilateral indikasi kebutuhan anggaran tahun 2016.

10.	Tanggal 9 Februari 2015, Gedung PIA	Rapat Persiapan Workshop KESR dan D8	Pusat KLN Ditjen PPHP Biro Umum	<ul style="list-style-type: none"> Matriks tugas panitia 	Konfirmasi nara sumber dan moderator
11.	Tanggal 9 Februari 2015, Puslitbang Tanaman Pangan, Bogor	Persiapan pelaksanaan <i>11th Session of the GC CAPSA</i> (yang akan diselenggarakan di Bogor, Indonesia, pada tanggal 12-13 Februari 2015	Pusat KLN; Setba Litbang; Pangan; PSEKP; BB Biogen; BB Pasca Panen; CAPSA dan Puslitbang Tanaman	<p>Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Venue meeting</i> di Aula Puslitbang Tanaman Pangan, Jl. Merdeka 147, Bogor; Peserta berjumlah 25 orang, terdiri dari 10 (<i>member Governing Council</i>); 4 (ESCAP); 2 (<i>International Organization</i>); dan 9 (CAPSA); Menteri Pertanian Fiji dan Sekretaris Menteri Pertanian Sri Lanka akan hadir; Pidato sambutan. Materi : Pidato sambutan untuk acara <i>Policy Dialogue</i> dan <i>Governing Council</i>, dan <i>Dinner</i> disiapkan oleh PSE-KP, Puslitbang Tanaman Pangan, Pusat KLN, dan Setba Litbang; 	Pelaksanaan <i>Policy Dialogue</i> dan Sidang GC CAPSA ke-11
12.	Tanggal 10-11 Februari 2015, Bogor	SATNET Policy Dialogue	CAPSA Pusat KLN Badan Litbang	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan secara resmi dibuka oleh Sekjen Kementerian Pertanian mewakili Menteri Pertanian RI, dan Sekretaris Badan Litbang memberikan presentasi mengenai Transfer Teknologi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan umum <i>Third SATNET Policy Dialogue</i> adalah untuk menghasilkan fokus baru mengenai pentingnya transfer teknologi dalam post-2015 <i>Sustainable Development agenda</i>. 	Pusat KLN telah melaporkan hasil pertemuan ini kepada Sekjen
13.	Tanggal Februari 2015/ Cendrawasih Room, JHCC,	Pertemuan Tim World Economic Forum (WEF) dengan Bapak	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Jenderal Kementan Pusat KLN 	<ul style="list-style-type: none"> Tim WEF meminta dukungan dari kementan dan mengharapkan Menteri Pertanian dapat turut berpartisipasi dan memberikan remarks pada pertemuan tersebut dan turut mengundang para AMAF Leader, yaitu 	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Sekjen menyampaikan bahwa secara prinsip akan mendukung

	Senayan	Sekjen	<ul style="list-style-type: none"> Tim WEF 	<p>pada Menteri Pertanian Negara ASEAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim WEF menyampaikan bahwa segala pengaturan logistik akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak WEF, sementara kepanitiaan nasional dipimpin oleh Kemenko Ekuin. 	<p>acara ini dan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bapak Menteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak WEF akan berkoordinasi lebih lanjut terkait materi pertemuan dan persiapan-persiapan yang diperlukan.
14.	Tanggal 12-13 Februari 2015/ Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar, Bandung	Rapat Persiapan Sidang <i>International Tripartite Rubber Council</i> (ITRC) ke-24	Rapat dipimpin oleh Direktur Kerja Sama APEC dan OIL Kemdag dan dihadiri oleh K/L, akademisi, dan swasta terkait kerjasama ITRC.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya membangun sinergitas dengan lembaga penanaman modal, dari sisi industri yang perlu didorong kedepan adalah memproduksi barang berpotensi lainnya. 2. Balai Perindustrian juga dapat membantu mengajarkan pengolahan lebih lanjut bahan karet skala <i>home industry</i>. 3. Dekarindo dan Kadin menyampaikan perlunya program pendampingan dari ITRC kepada petani. 4. Agenda selanjutnya adalah pembahasan Matriks Posisi Indonesia pada Rangkaian Pertemuan ITRC ke-24 	Tindak lanjut rapat ini adalah akan diadakannya rapat oleh Ditjen.Perkebunan Kementerian Pertanian, tentatif tanggal 16 Februari 2015 untuk membahas perkembangan <i>cost of production (CoP)</i> dan posisi Indonesia di Sidang ITRC ke-24.
15.	Tanggal 12-13 Februari 2015, Bogor	Sidang GC CAPSA ke-11	Pusat KLN Kemlu CAPSA Balitbang 11 negara anggota GC Oranisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan membahas beberapa hal yang penting, diantaranya capaian CAPSA sejak GC CAPSA ke-10, perkembangan proyek SATNET, fokus CAPSA 2015, pembahasan isu administrasi dan finansial CAPSA, dan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus dari negara-negara anggota. Agenda terakhir yang dibahas Pertemuan GC adalah status administrasi dan finansial CAPSA. Ditilik dari prosentasenya, 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya untuk meningkatkan kontribusi ini sudah dilaksanakan Kementerian Pertanian selaku <i>focal point</i> Indonesia sejak tiga tahun yang lalu

			dibawah UNESCAP	<p>7% dana yang dihimpun CAPSA berasal dari kontribusi negara anggota dan digunakan untuk operasional CAPSA yaitu menggaji personel, perjalanan, dan perlengkapan. Sementara, 19% berasal dari <i>regular budgetary</i> UNESCAP, dan sisanya, 74%, adalah dana dari donor yang digunakan untuk menjalankan proyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada tiga pilihan opsi yang ditawarkan kepada sidang <i>Governing Council</i> menghadapi kondisi tersebut. Opsi pertama adalah GC memandatkan CAPSA untuk terus menjalankan fungsinya selama ini. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah negara-negara anggota harus meningkatkan iuran kontribusinya untuk menunjang operasional CAPSA. Opsi kedua adalah merger antara badan-badan subsider ESCAP, misalnya CAPSA dengan CSAM. Dengan opsi ini maka dilakukan <i>review</i> statuta kedua badan tersebut serta perlu kesepakatan antara <i>host country</i> CAPSA (Indonesia) dan <i>host country</i> CSAM (China) tentang siapa yang akan menjadi <i>host</i> badan yang digabungkan tersebut. Opsi ketiga adalah GC memandatkan dibubarkannya CAPSA. 	<p>ketika masalah semakin menipisnya dana cadangan CAPSA yang digunakan untuk menutup defisit akan segera habis pada tahun 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk nominasi anggota GC, masing-masing negara diminta untuk mengisi <i>nomination form</i> apabila berminat menjadi anggota GC dan menyerahkan kepada UNESCAP selambatnya tanggal 26 Mei 2015.
16.	Tanggal 15-18 Februari 2015	<i>BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2015</i>	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri.	<p>Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain:</p> <p>a. <i>Rolling Pipeline 2015-2016, proyek-proyek yang diusulkan adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>JV on hybrid rice production</i> Rencana tahun 2015, Indonesia akan memperluas wilayah benih padi hibrida di Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulsel dan Sulteng seluas 76.000 ha, dan tahun 2016 penambahan luas area sekitar 20% menjadi 91.200 di wilayah yang sama; 2. <i>Partnership on hybrid corn production</i> Tahun 2015 Indonesia memiliki 4000 ha tanaman 	Pusat KLN akan mendiseminasikan hasil dari Pertemuan ini ke Eselon I terkait.

				<p><i>jagung hibrida di wilayah Sulsel, Sulut dan Kaltim. Tahun 2016 rencananya akan diperluas menjadi 8000 ha di wilayah yang sama;</i></p> <p>3. <i>Date cola commercialization;</i></p> <p>4. <i>Halal project</i></p> <p>5. <i>Coco coir Project funded by JAIF</i></p>	
17.	Tanggal 16-18 Februari 2015/ Makassar Sulsel	Koordinasi Kerjasama Sub Bidang Non ASEAN di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Pusat KLN 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa poin penting hasil diskusi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Sesuai hasil pameran pada sidang <i>The 2nd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair & Business Leaders' Conference</i> yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Oktober 2014 di Kota Davao, Filipina, Kopi Luwak Sulawesi Selatan masuk dalam urutan ke-8 kategori produk terbaik selama pameran berlangsung; (ii) Di tahun 2015, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan padi, jagung, dan kedelai, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah siap melakukan ekspor beras sebesar 200.000 ton (dengan sasaran strategis yaitu Filipina). (iii) Rincian per Kabupaten: Bone 50.000 ton, Wajo 50.000 ton, Pinrang 50.000 ton, Sidrap 50.000 ton, Bulukumba 20.000 ton, Soppeng 20.000 ton, Maros 20.000 ton. 	1. Pemerintah Indonesia harus memiliki strategi untuk menurunkan/ menyetarakan harga beras premium yang akan di ekspor ke negara lain.
18.	Tanggal 17 Februari 2015, di Kementerian Perdagangan	Rapat tindak lanjut pertemuan D-8 WGST	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pemasaran Luar Negeri KKP Direktorat Pakan Ternak Kementan Puslitbang TP 	<ul style="list-style-type: none"> Dit. Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP Kemtan mengusulkan 12 komoditas prioritas yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, teh, kopi, ubi kayu, tembakau, lada, kulit dan jangat, pinang, serta jahe. Dit. Pakan Ditjen PKH Kemtan mengusulkan 4 komoditas yaitu jagung dan bungkil kedelai untuk prioritas impor, dan bungkil inti sawit dan dedak padi untuk prioritas ekspor. 	1. Rapat menyepakati bahwa daftar final komoditas prioritas perlu disampaikan kepada Dit. Standardisasi Kemdag selaku <i>focal point</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN Kementan • Komite Timur Tengah Kadin • Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) • Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) • Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) • Dit. PI, Ditjen PPHP • Dt. Mutu dan Standardisasi • Dit IKD Kemenperin • Dit Sosbud OINB Kemlu • GPMT 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) menambahkan beberapa komoditas yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (i) komoditas sektor pertanian: resin & resin acids; gum damar; mace; cloves, whole fruits; other fresh fruits of a kind suitable for bouquets/ornamental purpose; mangosteens; cinnamon (cinnamon zeylacum blume),neither crushed nor ground; cinnamon and cinnamon-tree flower, crushed or ground. (ii) Komoditas sektor kelautan dan perikanan: oth salmonidae fish excl fillet, liver and roes, fresh or chilled; kerapu (cromilepte altivelis, epinephelu, leopardis) fresh or chilled; cuttle fish and squid, frozen; milkfish or lapu-lapu fry, live for oth than breeding; octopus, frozen; • Dari usulan yang prioritas yang diterima, Dit. Standardisasi telah menyusun daftar berdasar kode HS 10 digit. Di dalam daftar tersebut, komoditas usulan Dit. Mustar dijabarkan menjadi 21 kode HS dan ditambah dengan 9 kode HS usulan Ditjen PEN (total 30 kode HS), komoditas usulan Dit Pakan Ternak dijabarkan menjadi 4 kode HS, sedangkan 5 komoditas usulan KKP dijabarkan menjadi 22 kode HS ditambah dengan 5 kode HS usulan Ditjen PEN (total 27 kode HS) 	<p>WGST dalam waktu 2 minggu setelah rapat. Mengingat pada rapat dimaksud perwakilan Dit. Mustar dan Dit PI Kemtan tidak dapat hadir, maka perwakilan Kemtan belum dapat menyampaikan masukan atas daftar komoditas prioritas tersebut.</p> <p>2. Sebagai tindak lanjut, Pusat KLN Kemtan selaku koordinator kerjasama ketahanan pangan D-8 di Indonesia telah berkomunikasi lebih lanjut dengan Dit. PI dan Dit. Mustar guna melakukan verifikasi daftar kode HS komoditas yang diusulkan</p>
19.	Tanggal 20-21 Februari 2015/ Ruang Rapat, BBP2TP, Bogor	Rapat Koordinasi APEC 2015 bidang Pertanian dan Ketahanan	Dit. KIK ASPASAF- Kementerian Luar Negeri, PusKita KKP, Dit. Pemasaran Luar Negeri-KKP,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemlu menyarankan agar instansi teknis (Kemtan dan KKP) dapat mengawal agenda dan <i>outcome</i> yang akan diusung pada <i>High Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy</i>. 2. Berdasarkan hasil dari pertemuan bilateral antara SOM Leader Indonesia dengan Amerika pada SOM 1, bahwa 	- Kemtan dan KKP perlu mempersiapkan posisi tindak-lanjut hasil pertemuan sebelumnya di masing-masing <i>Fora/WG</i> (PPFS,

		Pangan	<p>Direktorat teknis lingkup Kementerian Pertanian yaitu Sekretariat Ditjen.PPHP, Sekretariat BKP, Sekretariat Badan Litbang Pertanian dan BB Biogen.</p>	<p>secara informal AS tertarik dengan isu ketahanan pangan utamanya dalam hal pengurangan kehilangan pasca panen melalui pembangunan infrastruktur.</p> <p>3. Masing-masing <i>Fora/WG</i> memungkinkan untuk mengajukan <i>concept notes</i> peningkatan kapasitas lintas sektoral dan dapat saling berkoordinasi.</p> <p>4. Indonesia masih membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan <i>EGs List</i> dalam tataran teknis. Usulan Indonesia untuk menerapkan PMK 10/2007 pada 10 produk pada HS6 yang <i>tariff</i>-nya diatas 5% mendapat penolakan dari anggota APEC.</p> <p>5. APEC-PSU saat ini sedang melakukan kajian dari beberapa produk terpilih hasil pengusulan <i>Development Product</i> dari anggota ekonomi APEC.</p>	<p>ATCWG, HLPDAB, OFWG).</p> <p>- Ditjen. Perkebunan dan Ditjen. PPHP diharapkan menyiapkan data dukung terkait kelapa sawit dan karet alam.</p> <p>- PPFS diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada pihak swasta yang aktif di fora PPFS (Bpk. Hari Hanawi) untuk menjajaki dukungan <i>Malaysian Palm Oil Council</i> (MPOC) untuk mengawal komoditas kelapa sawit (Co-sponsor).</p> <p>- Diharapkan masing-masing <i>Fora/WG</i> membahas lebih lanjut <i>pending matters</i> maupun usulan yang akan diajukan pada tahun 2015 serta mempersiapkan rencana <i>Concept Notes</i> yang akan dibawa pada kegiatan Kemlu yaitu Lokakarya optimalisasi</p>
--	--	--------	---	---	---

					forum APEC di Bandung pada tanggal 26-27 Februari 2015.
20.	Tanggal 23 Februari 2015 di Museum KAA Bandung	Rapat <i>Mapping</i> Prioritas Bantuan Teknis,	K/L terkait bantuan teknis KSST termasuk Kemtan (Pusat KLN, Puslatan, BBIB Singosari, BBPP Lembang)	Kemenlu akan mengkompilasi seluruh masukan terkait prioritas negara penerima bantuan teknis sebagai pedoman K/L dalam mengajukan kegiatan bantuan teknis KSS dengan biaya APBN.	Kementerian Pertanian akan mengacu pada list skala prioritas bantuan teknis dari hasil pemetaan prioritas dalam mengajukan kegiatan KSST.
21.	Tanggal 24 Februari 2015, di Kantor Disperindag Bandung	Konsultasi Publik Hasil Pertemuan APEC CT11 2015	Kemdag, 18 K/L terkait APEC CTI termasuk Kementerian Pertanian (Ditjen.PPHP, BKP dan Pusat KLN), KADIN dan pihak swasta (eksportir) serta akademisi dan mahasiswa.	Beberapa hal penting dari pemaparan Direktur APEC dan OIL Kemdag yang dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun acuan para stakeholder dalam rangka mengambil kebijakan terkait APEC, diantaranya sebagai berikut: i). Strategi kerjasama perdagangan Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU tentang perdagangan No.7 tahun 2014. ii). Strategi perdagangan Indonesia adalah dari 4 pilar: - <u>Barang</u> : Penurunan Hambatan Tarif dan Non Tarif, SPS, RoO. - <u>Jasa</u> : Akses pasar melalui pengurangan hambatan serta akses peningkatan kapasitas. - <u>Investasi</u> : Peningkatan investasi dan fasillitasi. - <u>Kerjasama peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur</u> melalui empat (4) pilar strategi melalui <i>market maintenance, market creation, product creation and export facilitation and import management</i> .	Dalam menyusun posisi pada pertemuan ini, Indonesia c.q. Kemtan perlu mewaspadaai agar jangan sampai kemampuan kita untuk meningkatkan ketahanan pangan terkompromikan dengan liberalisasi perdagangan.
22.	Tanggal 25 Februari 2015,	Rapat Bantuan <i>Capacity</i>	Direktorat Kerja Sama Teknik,	Kementerian Pertanian telah memberikan informasi terbaru terkait data bantuan teknis yang telah diberikan kepada Timor	PKLN akan berkoordinasi lebih lanjut

	Kementerian Luar Negeri	<i>Building RI-Timor Leste</i>	Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Sekretariat Negara, Sekolah Tinggi Multimedia, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Pertanian (BBIB Singosari, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Pusat Pelatihan Pertanian, BUTTMKP, Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, dan Pusat Kerja Sama Luar Negeri)	Leste dalam rangka berkontribusi pada pemenuhan komitmen Presiden SBY pada tahun 2013 sebesar 6 juta USD serta data rencana kegiatan ke depan.	dengan instansi teknis pelaksana terkait perkembangan data dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
23.	Tanggal 24-27 Februari 2015, Hotel Hilton	<i>Sidang International Tripartite Rubber Cooperation (ITRC) ke-24</i>	Indonesia, Malaysia, Thailand	Dalam rangka memperoleh rekomendasi mengenai strategi ke depan untuk industri Karet alam dunia, ITRC mengundang pengamat Karet Alam (Dr. Hidde Smit). Dari pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkiraan trend pertumbuhan konsumsi karet alam dunia (2008-2024) rata-rata 3,5% per tahun.	Kemtan perlu mencermati kembali posisi Karet Alam Indonesia dikaitkan dengan hasil analisa yang dipaparkan oleh Dr.

				<p>2. Sensitivitas harga karet masih banyak tergantung pada adanya bahan substitusi (Karet sintetis) dan kebutuhan industry pengguna NR.</p> <p>3. Skenario yang direkomendasikan terkait Government Buffer Stock adalah GBS akan terus membeli Karet alam sampai dengan harga menjadi minimal USD 1,6 dan akan menjual pada saat harga diatas USD 1,80.</p>	<p>Hidde Smit.</p>
24.	<p>Tanggal 26 Februari 2015, Kementerian Perdagangan</p>	<p>Rapat Tindak Lanjut Pertemuan APEC GOS 1 tahun 2015 dan Pertemuan Terkait Jasa lainnya</p>	<p>Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, KKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>Para <i>stakeholder</i> telah menyampaikan update terkait hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka penyiapan posisi dalam isu <i>Environmental Services</i> (ES) dan <i>Manufacturing Related Services</i> (MRS) , Perkembangan Isu <i>Environmental Services</i>, Perkembangan Isu <i>Manufacturing Related Services</i>, dll.</p>	<p>Kementerian Pertanian dalam hal ini perlu mengikuti setiap perkembangan yang ada dalam forum APEC.</p>

25.	Tanggal 26 Februari 2015	<i>Rapat Persiapan Strategic Planning Meeting</i> IMT-GT	Kemlu, Kemhub, BKPM, Kemdag, Kemtan (Pusat KLN, Barantan, PPHP), BNPP, Perwakilan Propinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan SPM IMT-GT akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Maret 2015 di Hotel Alila, Jakarta. 2. Terkait WGAAE, Pusat KLN menyampaikan bahwa untuk periode tahun 2014-2016, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dibawah kerjasama IMT-GT diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>IMT-GT Network for Animal Production and Biotechnology</i> dengan fokus kegiatan pada pertukaran tenaga, kerjasama penelitian, seminar internasional. b. Pengembangan ekspor perikanan dari Aceh ke Malaysia; c. Pengembangan ekspor produk-produk pertanian dari Aceh ke Malaysia (kentang, wortel, kubis, dll); d. pendirian pabrik pakan ternak Malaysia di Aceh; e. pembukaan Agro-bazaar Malaysia di Banda Aceh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan pelaksanaan Pertemuan WGAAE, Malaysia akan menjadi chair dalam pertemuan SPM mendatang.
26.	Tanggal 26-27 Februari 2015	Lokakarya Optimalisasi pemanfaatan APEC	Kemlu, Kemdag, BSN, Bappenas dan s eluruh K/L terkait APEC termasuk Kemtan (BKP, Balitbangtan, dan Pusat KLN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para peserta Lokakarya menerima informasi mengenai Prioritas APEC dan prioritas nasional Indonesia dalam rangka menyusun posisi Indonesia pada forum APEC. 2. Para peserta menerima informasi mengenai mekanisme pengajuan Concept Notes (proposal kegiatan untuk memperoleh pendanaan APEC). 3. Kementerian Pertanian melakukan simulasi pembuatan Concept Notes berjudul Seminar on Developing the concept of Vegetable Oil Law Enforcement, Governance and Trade (VOLEGT) 	Kementerian Pertanian (BKP, Balitbang dan Pusat KLN) perlu melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mematangkan konsep yang telah diinisiasi oleh masing-masing For a/WG.

III. KERJASAMA MULTILATERAL					
1.	Tanggal 27 Januari 2015/ R.R Bank Indonesia	Rapat IFAD- APRACA	Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Kalautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas	<p>1. Indonesia merupakan anggota APRACA, yaitu Asosiasi Kredit Pertanian dan Pedesaan Asia Pasifik. IFAD telah memberikan hibah kepada APRACA sebesar US\$ 1.100.000,- untuk proyek "Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro Poor Rural Financial Services in Developing Countries". Proyek ini bersifat <i>multi years</i> (periode tahun 2014-2017) yang dilaksanakan di lima negara, yaitu Cina, India, Thailand, Philipines dan Indonesia.</p> <p>2. Rapat bertujuan untuk membahas skema pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan diusulkan menjadi <i>best practices</i> dalam proyek tersebut. Hasil <i>survey</i> lapangan yang meneliti beberapa LKM telah dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) antara lain: (i) Baitul Mal Wat Tamwil (rumah harta, zakat dan keuangan) - Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Sidogiri, di Pasuruan, Jawa Timur (ii) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo, di Payakumbuh, Sumatera Barat (iii) Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Samudera di Tangerang, Banten (iv) SPP UPK Sidomulyo di Lampung (v) KUR di Cianjur.</p>	Kementerian Pertanian diharapkan sebagai anggota <i>Working Group</i> (WG) untuk penetapan <i>best practices</i> yang sesuai dengan kriteria dimaksud dan dapat mengkomunikasikan kepada IFAD.
2.	Tanggal 28 Januari 2015/ R.R Ditjen Multilateral	Pembahasan Global Health Security Agenda (GHSA)	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal 13 Februari 2014 di Washington DC, Amerika Serikat dan di Kantor WHO Jenewa, <i>Global Health Security Agenda</i> (GHSA) diluncurkan sebagai tanggapan Amerika Serikat atas meningkatnya kerentanan masyarakat global terhadap berbagai penyakit baru dan pandemi karena dampak negatif perubahan iklim, meningkatnya lintas manusia dan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemri perlu memutuskan <i>focal point</i> GHSA dan <i>focal point</i> masing-masing K/L (Kemenko PMK, Kemenko Polhukam,

			<p>Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan/TNI, Kementerian Pertanian.</p>	<p>lintas negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Forum GHSA bertujuan memperkuat kapasitas untuk mendeteksi dan merespon wabah penyakit menular, pandemi, bioterorisme, melalui <i>International Health Regulations</i> 2005 (IHR) yang lebih efektif. •Tanggal 5-6 Mei 2014 di Helsinki, Finlandia dilaksanakan pertemuan lanjutan GHSA yang dihadiri oleh <i>expert</i> dari 25 negara dan wakil dari WHO, FAO, OIE dan EU. •Rapat membahas keanggotaan Indonesia pada GHSA dan mengusulkan agar Pemri tidak menjadi ketua Troika tahun depan (2016) dan berupaya agar keketuaan Indonesia tahun depan dialihkan ke Korea Selatan. •Pertimbangan Pemri disampaikan dalam rapat untuk tidak mengambil <i>lead</i> dalam GHSA dan hendaknya Pemri berupaya agar tidak masuk <i>steering group</i> untuk disampaikan secara baik kepada anggota Troika pada saatnya, mengingat keanggotaan pada GHSA, keterlibatan Pemri pada bidang-bidang GHSA yang memang bermanfaat untuk peningkatan kapasitas. 	<p>Kemkes, Kemtan, Kemlu, Kemhan/TNI, Kemkeu (Bea cukai), Kemkumham, Kemristek Dikti, KLH dan Kehutanan, BIN, BNPT, BAIS TNI, POLRI, LIPI);</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kemenko PMK perlu membentuk pokja kerja sama internasional di bawah Komnas zoonosis, Kemlu sebagai ketua, wakil yaitu Kemkes dan Kemtan; •Pemri perlu membuat <i>mailing list</i> untuk koordinasi GHSA; •Pemri perlu segera melakukan sosialisasi komprehensif terkait kerja sama GHSA sehingga semua K/L mempunyai pandangan dan posisi yang sama; •Pemri perlu membuat <i>consolidated parameters</i> mengenai kerja sama kesehatan dan keamanan kesehatan; •Pemri perlu menetapkan
--	--	--	--	--	---

					aplikasi strategi keamanan nirmiliter
3.	Tanggal 28-29 Januari 2015/ Cipayung, Bogor	Rapat Konsolidasi dan Rekonsiliasi PNBP dan Hibah Lingkup Kementerian Pertanian	Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kemtan; Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kemtan	Penyusunan Laporan Keuangan harus didukung dengan dokumen yang akuntabel, yang salah satu strateginya adalah melakukan rekonsiliasi. Data hibah sub komponen Program READ (<i>Rural Empowerment and Agriculture Develompent</i>) yang sudah direkonsiliasi telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai data pendukung dalam Laporan Keuangan yang akuntabel.	
4.	Tanggal 3 Februari 2015 di Sofyan Betawi Hotel		<ul style="list-style-type: none"> • FAO • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Bappenas • LSM (FIELD dan VECO) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Miao Weimin, <i>Technical Aquaculture Officer at FAO-RAP</i> memaparkan <i>RRI phase I – Implemented in 2013</i>. 2. KKP meminta Ditjen Tanaman Pangan, Kemtan untuk membuat <i>pilot project</i> Mina Padi. 3. Untuk memperkuat koordinasi tersebut maka kedua instansi akan memperbaharui perjanjian pada tingkat Menteri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Tanaman Pangan akan menyampaikan terkait pilot project Mina Padi kepada Dirjen Tanaman Pangan untuk dapat ditindaklanjuti dengan KKP.
5.	Tanggal 6 Februari 2015 di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor	Koordinasi Kegiatan KSST TA.2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Bappenas • Badan PPSDMP • Ditjen Peternakan • Biro Perencanaan • Biro Keuangan dan Perlengkapan • BBIB Singosari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan Mei 2015 ini akan segera dilaksanakan pelatihan yang melibatkan peserta dari negara sekitar, seperti : Mozambik, Zimbabwe, Afrika Selatan dan lain-lain 2. kegiatan hibah harus dapat memantau perkembangan. 3. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan hendaknya dapat membuka peluang dalam aspek ekonomi. 4. perlu <i>database</i> terkait kegiatan KSS yang dapat disusun dalam sebuah buku pintar sebagai sarana <i>transfer</i> informasi dimana dapat di jelaskan produk-produk unggulan dari sektor pertanian Indonesia. 5. Perlu pemetaan terkait kegiatan KSS untuk acuan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappenas sedang mempersiapkan aturan main terkait batuan hibah dalam rangka kerjasama selatan-selatan.

				(lima) tahun ke depan yang dimasukkan kedalam Renstra Kementerian Pertanian di tahun 2016. 6. tata cara dalam penyediaan anggaran dalam rangka KSS belum tertuang dalam aturan hibah dari Bappenas.	
6.	Tanggal 6 Februari 2015/ R.R 332 Kementerian Pertanian Jakarta	Rapat Penyusunan COSOP IFAD Indonesia	Eselon I lingkup Kemtan, IFAD	Kementerian Pertanian dalam kerangka penyusunan <i>Country Strategic Opportunities Program</i> (COSOP) periode 2015-2019, akan mengusulkan replikasi proyek dalam hal ini proyek <i>Integrated Horticulture Development in Upland Areas</i> (IHUA) dan <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i> (IPDMIP) yang <i>inline</i> dengan Renstra Pertanian dan terintegrasi antar sektor.	
7.	Tanggal 6 Februari 2015/ R.R SS-4 Gd. TS 2 BAPPENAS	Pertemuan <i>Country Programme Management Team</i> (CPMT)-IFAD	Bappenas, Kemkeu, Kemtan, KKP, Kemdagri, Kemlu dan IFAD.	Penyampaian paparan interim COSOP 2014-2015 dan rencana <i>Bluebook</i> 2015-2019 yang akan menjadi bahan COSOP IFAD 2015-2019. COSOP yang baru akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pada perumusan DRPLN-JM/Bluebook 2015-2019 dengan jadwal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi proposal proyek dengan K/L Pemda dan BUMN tanggal 20 Februari 2015 • Koordinasi dengan mitra pembangunan tanggal 3-13 Februari 2015 • Persetujuan Bluebook akhir februari 2015 	Pihak BAPPENAS akan menyelenggarakan rapat lanjutan yang direncanakan tanggal 11 Februari 2015.
8.	Tanggal 9 Februari 2015, Pusat KLN, Kemhut	Rapat pembahasan GEF-PJF	<ul style="list-style-type: none"> • FAO • Ditjen Hortikultura • Badan PPSDMP • Dit. PEPDAS, Kemhut • Bappenas 	Terkait hasil diskusi mengenai GEF <i>Project Identification Form</i> (PIF) yang berjudul <i>Java Integrated Landscape Management Project</i> yang disampaikan oleh FAO sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan dari FAO Rep-Jakarta bahwa <i>system co-finance</i> yang akan diterapkan adalah sistem <i>parallel</i> dimana <i>project</i> tersebut dijalankan oleh pemerintah yang menerima bantuan. 	Rapat lanjutan terkait GEF-PIF akan di laksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2015

				<ul style="list-style-type: none"> • Dir. PEPDAS memberikan informasi terkait degradasi lahan di daerah Sungai Brantas dan Sungai Citarum menjadi prioritas untuk dipulihkan. • Bappenas memberikan tanggapan terhadap pentingnya konfirmasi terkait project GEF dan detail dari <i>project</i> tersebut. Komponen dan <i>output</i> perlu diperjelas dan perlu pendekatan ke masyarakat dalam merubah praktek pertanian. • FAO memerlukan data dari masing-masing K/L apa kegiatan yang sejalan dengan proyek GEF. Sehingga FAO tidak memulai kegiatan tersebut dari awal. 	
9.	Tanggal 9 Februari 2015, Kampus Kemeterian Pertanian	Rapat Tindak Lanjut Penandatanganan Lol kerja sama RI -FAO	Esselon 1satu lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah/ proses menuju Partnership setelah ditanda tanganinya Lol pada Desember 2014 langkah selanjutnya pemri akan : <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan <i>priority areas</i> kerja sama untuk <i>Country Programming Framework</i> (CPF) dan <i>South-South Cooperation</i> (SSC) dan Triangular dalam bentuk <i>cluster of programs</i>. - menyampaikan <i>comments</i> atau <i>counterdraft</i> - membahas draft <i>Agreement</i>, CPF, kerangka SSC dan Triangular dan <i>Host Country Agreement</i> (HCA). - Penyelarasan dan finalisasi <i>Agreement</i>, CPF dan kerangka SSC dan Penandatanganan <i>Agreemeny Partnership</i> dan HCA 2. Dokumen-dokumen yang akan disepakati, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Agreement on Partnership</i> b. CPF dan KSST (Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular) c. <i>Partnership</i> RI – FAO d. <i>Agreement on FAO Partnership & Liaison Office and TC</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat KLN Kemtan akan merumuskan <i>priority areas</i> berdasarkan masukan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Eselon 1 lingkup Kemtan. 2. Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 akan melaksanakan rapat untuk merumuskan <i>counter-draft</i> dan minimal <i>preliminary</i>

				Wakil dari KKP dan eselon satu kemtan menyampaikan beberapa masukan terkait CPF (lihat matriks program prioritas kerja sama RI – FAO) serta masukan terkait <i>priority areas</i> dari Dr. Hamim.	<i>assessment</i> Pemri terhadap draft <i>Agreement on Partnership</i> yang diajukan oleh FAO.
10.	Tanggal 11 Februari 2015/ R.R SS 4 BAPPENAS	Pertemuan pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Bappenas, Kemkeu, Kemtan	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau <i>Bluebook</i> harus disahkan enam bulan setelah RPJMN. Sesuai dengan hasil pembahasan antara MenPPN/Ka Bappenas, Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan, prosesnya akan dipercepat.</p> <p>Rencana penandatanganan <i>Host Country Agreement</i> (HCA) IFAD yang akan diikuti oleh pembukaan kantor perwakilan IFAD pada 28 Maret 2015 di Jakarta dan penyusunan COSOP IFAD Indonesia periode 2015-2019 juga menjadi pertimbangan rapat.</p> <p>Kemtan menyampaikan arahan Kepala BPPSDMP untuk keberlanjutan READ agar terus dilaksanakan monev pasca program READ, selanjutnya pengembangan kakao di seluruh Sulawesi dan replikasi READ ke area perbatasan yaitu Kaltim, Kaltara dan Papua selain dari NTT dan Kalbar karena kedua provinsi tersebut sudah disiapkan penggunaan APBN.</p> <p>Rapat juga membahas usulan perubahan kegiatan SOLID pasca MTR IFAD dengan Kemkeu dan BAPPENAS.</p>	Rapat sepakat untuk membahas lebih rinci kepastian proposal <i>Blue Book</i> 2015-2019 dengan BAPPENAS, Kemkeu dan Kemtan sedangkan BPPSDMP yang akan mengundang konsinyering penyusunan proposal dimaksud pada minggu depan.
11.	Tanggal 12 Februari 2015 Kanpus Kementerian Luar Negeri	Rapat Pembahasan Peningkatan Kerja Sama RI – FAO “ <i>Agreement on</i>	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> - Draft awal <i>Agreement</i> dari FAO masih sumir – draft tersebut dibuat berdasar kan template <i>agreement</i> dengan negara lain - Saran posisi Pemri: negosiasi <i>Agreement on Partnership</i> terlebih dahulu, sambil menunggu kejelasan sikap Pemri re 	1. Merumuskan <i>counter-draft</i> atau minimal <i>preliminary assessment</i> Pemri terhadap draft <i>Agreement on</i>

		<i>Partnership</i>	Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bappenas	HCA dengan badan-badan PBB dan Organisasi Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Substansi Agreement on FAO partnershyp and Liaison Office nantinya akan menyesuaikan dengan standar HAC - Format struktur draft Agreement on Partnership yang diusulkan FAO agak berbeda dari format Agreement sejenis lainnya 	<i>Partnership</i> yang diajukan oleh FAO 2. Menyampaikan <i>counter-draft</i> ke FAO via KBRI Roma 3. Menjadwalkan perundingan dengan FAO 4. Penyempurnaan posisi Pemri selama proses perundingan 5. Target penandatanganan <i>Agreement Partnership dan Host Country Agreement</i>
12.	Tanggal 13 Februari 2015/ BKF Kemkeu	Rapat Persiapan Bahan Sidang <i>Governing Council</i> IFAD ke-38	Kemenkeu, Kemlu, Bappenas, Kemtan	Delri dari Kementerian Pertanian pada Sidang <i>Governing Council</i> IFAD ke-38 tanggal 16-17 Februari 2015 tersebut adalah Bapak Sekjen dan Bapak Kapus Pusat KLN. Beberapa bahan yang dipersiapkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Provisional Agenda</i> - Surat Undangan GC IFAD ke-38 - Status kontribusi Indonesia pada <i>Replenishment-9</i> dan - Dokumen pendukung 	
13.	Tanggal 17 Februari 2015/ R.R BBSDLP Cimanggu	Tim Pelaksana Perubahan Iklim	Setjen, Badan Litbang, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan	Khusus dari KLN menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kerjasama internasional di bidang perubahan iklim • Memfasilitasi networking, seminar, dan negosiasi internasional perubahan iklim 	Direncanakan akan ada sosialisasi mitigasi dan perubahan iklim.

	Bogor		dan KH, Ditjen PSP, Badan Karantina	Sebelum Juni menyiapkan format proposal “Produksi pertanian tanpa limbah” untuk 3 eselon I untuk diajukan kepada ICCTF	
14.	Tanggal 16 – 18 Februari 2015 di Wisma Kementan Cipayung - Jawa Barat	<i>Short Term Capacity Building</i> untuk Pemahaman Aturan Perdagangan Internasional (WTO dan Regional), serta Teknik Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Pertemuan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pemasaran Internasional, Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan Pemerintah New Zealand. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang merupakan pejabat dan staf senior perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang menangani kerjasama internasional. Diantara perundingan internasional yang dihadapi Indonesia tahun 2015 antara lain: ASEAN Economic Community, RCEP, ASEAN Mitra Dialog, penyelesaian Post Bali Programme WTO dll. Adanya kegiatan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementan dalam negosiasi kerjasama perdagangan internasional, yang pada akhirnya dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya sektor pertanian didalam berbagai negosiasi di forum internasional 	
15.	Tanggal 20 – 21 Februari 2015 di Wisma Bhakti Pertiwi, Bogor	Rapat Pemetaan potensi komoditas pangan untuk kerjasama internasional	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Eselon 1 Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Judul buku mengalami perubahan menjadi “Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional”. Masing-masing eselon 1 telah menyempurnakan masukan terkait program prioritas yang akan menjadi usulan kerjasama internasional atau usulan hibah dari lembaga donor. Format buku sudah dirapikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan workshop terkait prioritas kerjasama internasional pada awal bulan April 2015 untuk memperkuat justifikasi dari usulan tersebut.
16.	Tanggal 25 Februari 2015	Rapat Usulan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> Bappenas Biro Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan usulan proyek <i>Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan pagu PHLN proyek <i>Flood</i>

	di R.R. PKLN	Pinjaman dari Ditjen. PSP	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Keuangan dan Perlengkapan • Ditjen. PSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek ini sudah tercantum dalam <i>Blue book</i> (BB) 2011-2014 dengan pelaksana utama yaitu Kementerian PU. Tidak perlu diusulkan ke Bluebook 2015-2019. Kementan akan diberitahu oleh Bappenas untuk konfirmasi apakah proyek ini akan tetap didaftarkan di BB 2015-2019. • Proyek akan dilaksanakan mulai TA. 2016 namun pagu PHLN proyek ini belum diusulkan oleh Setditjen. PSP karena <i>loan agreement</i> belum ditandatangani. <p>2. Pembahasan usulan proyek <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation for Eastern and Western Indonesia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirjen PSP tidak puas dengan output proyek yang ditawarkan oleh IFAD. • Output proyek tersebut banyak bersifat non fisik dan tidak sesuai dengan tupoksi Ditjen PSP. • Belum ada pernyataan yang jelas dari Dirjen PSP terkait dengan tawaran pinjaman tersebut. • Bappenas menyarankan untuk segera diketahui jawaban pasti sehingga dapat dimasukkan ke dalam Blue Book dalam waktu yang tidak terlalu lama. 	<i>Management in Selected River Basin (FMSRB)</i> TA. 2016 akan secepatnya diajukan oleh Setditjen PSP melalui Pusat KLN.
17.	Tanggal 26 Februari 2015, Ruang Auditorium PTRI ASEAN Lantai 3 Pusdiklat Kemlu RI	Lokakarya Penyusunan Proposal Proyek <i>Common Fund for Commodities</i> (CFC)	Lokakarya dibuka oleh Bapak Antonius Yudi Triantoro PIH. Direktur PPIH, Multilateral, Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil Kementerian Koordinator Bidang	Lokakarya dilaksanakan dalam 2 sesi. Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Fahmi Jamaludin (Kasubdit Pangan dan Pertanian), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Tri Widjajanti (<i>Consultative Committee CFC</i> tahun 2011 – 2013, Pejabat Ahli Kementerian Pertanian) menyampaikan “Keanggotaan Indonesia di CF dan manfaatnya bagi sektor Komoditas Indonesia”. 2. Ketua Umum Dewan Teh Indonesia (DTI), Bendahara DTI dan <i>Project Manager Unit</i> (PMU) memaparkan proses pengusulan proyek yang dibiayai oleh CFC 	Pada pertemuan selanjutnya diharapkan Kementerian Luar Negeri dapat melakukan workshop penyusunan proposal proyek CFC dengan Format pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dibatasi 25-30 orang

	Jl.Sisingaman garaja No.73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan		Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, wakil Kementerian Luar negeri, wakil Kementerian Kelautan dan Perikanan, wakil Kementerian Pertanian, wakil Kementerian Kehutanan, wakil Kementerian Perindustrian, Wakil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, wakil dari Masyarakat Perikanan Nusantara, wakil Dewan Teh Indonesia, wakil IPB dan lain-lain.	yang diterima oleh DTI pada tahun 2011. Pada sesi kedua yang dimoderatori oleh Idhi Maryono, Bapak Hiras Sidabutar (<i>Consultative Committee CFC</i> tahun 2015 – 2016, Pejabat ahli Pengelola Proyek Sektor Kehutanan, Kementerian Kehutanan) menyampaikan mekanisme pengajuan proposal proyek oleh CFC.	2. Waktu minimum 2 hari, dipakai untuk class lecturing (app. 25%) dan exercises (app. 75%) 3. Peserta perlu dibagi menjadi 5-6 grup masing-masing ditugasi menyusun project proposal. 4. Perlu 3 orang tutors berpengalaman.
18.	Tanggal 26 Februari 2015 di R.R. PKLN	Rapat Pembahasan Proyek GEF	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) • Yayasan KEHATI 	1. Badan Litbang telah berpengalaman dalam menjalankan GEF-5 dan mengusulkan proyek " <i>Mainstreaming intervention strategies for on-farm and in-situ conservation in buffer zones for horticulture crops</i> " untuk masuk dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek Litbang akan dikirim akan langsung ke Sekretariat GEF

			<ul style="list-style-type: none"> • FAO • Kementerian Pertanian 	<p>skema GEF-6 pada bulan Maret 2015.</p> <p>2. Usulan proyek GEF dari FAO sama dengan usulan dari Conservation International (CI) sehingga perlu disatukan menjadi sebuah proyek besar.</p> <p>3. <i>Co-financing</i> hanyalah dalam bentuk kertas data (paper assessment) dan tidak ada anggaran yang masuk ke GEF. <i>Co-financing</i> ini menunjukkan keseriusan Negara calon penerima hibah GEF dalam menangani masalah lingkungan hidup di negaranya masing-masing.</p>	<p>melalui surat Sekjen untuk mengejar usulan pada bulan maret 2015. Sedangkan usulan proyek lainnya akan diusulkan pada bulan Juni 2015.</p>
19.	Tanggal 26 Februari 2015/ R.R Multilateral Kemlu	Koordinasi tim perizinan ormas asing	Kemenkopolkam, Kemlu, Kemdagri, Kemkeu, Kemkes, Kemhukham, Kemsetneg, Kemenag, Kemtan, Kemdiknas, BIN, BAIS TNI, BAINTELKAM POLRI.	Terkait dengan Kemtan yaitu perkembangan kerjasama dengan <i>International Trade Initiative/ Initiative Duurzame Handel</i> (IDH)	IDH diharapkan membuat draft MoU untuk dibahas lebih lanjut.
20.	Tanggal 26 Februari 2015, Ruang Auditorium PTRI ASEAN Lantai 3 Pusdiklat Kemlu RI Jl.Sisingaman	Lokakarya Penyusunan Proposal Proyek <i>Common Fund for Commodities</i> (CFC)	Lokakarya dibuka oleh Bapak Antonius Yudi Triantoro PIH. Direktur PPIH, Multilateral, Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan	<p>Lokakarya dilaksanakan dalam 2 sesi.</p> <p>Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Fahmi Jamaludin (Kasubdit Pangan dan Pertanian), sebagai berikut:</p> <p>1. bu Tri Widjajanti (<i>Consultative Committee CFC</i> tahun 2011 – 2013, Pejabat Ahli Kementerian Pertanian) menyampaikan “Keanggotaan Indonesia di CF dan manfaatnya bagi sektor Komoditas Indonesia”.</p> <p>2. Ketua Umum Dewan Teh Indonesia (DTI), Bendahara DTI dan <i>Project Manager Unit</i> (PMU) memaparkan proses pengusulan proyek yang dibiayai oleh CFC yang diterima oleh DTI pada tahun 2011.</p>	<p>Pada pertemuan selanjutnya diharapkan Kementerian Luar Negeri dapat melakukan workshop penyusunan proposal proyek CFC dengan Format pelatihan:</p> <p>5. Peserta dibatasi 25-30 orang</p> <p>6. Waktu minimum 2</p>

	garaja No.73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan		Manusia dan Kebudayaan, wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, wakil dari Kementerian Luar negeri, wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, wakil dari Kementerian Pertanian, wakil dari Kementerian Kehutanan, wakil dari Kementerian Perindustrian, Wakil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, wakil dari Masyarakat Perikanan Nusantara, wakil dari Dewan Teh Indonesia, wakil dari IPB dan lain-lain.	Pada sesi kedua yang dimoderatori oleh Idhi Maryono, Bapak Hiras Sidabutar (<i>Consultative Committee</i> CFC tahun 2015 – 2016, Pejabat ahli Pengelola Proyek Sektor Kehutanan, Kementerian Kehutanan) menyampaikan mekanisme pengajuan proposal proyek oleh CFC.	hari, dipakai untuk class lecturing (app. 25%) dan exercises (app. 75%) 7. Peserta perlu dibagi menjadi 5-6 grup masing-masing ditugasi menyusun project proposal. 8. Perlu 3 orang tutors berpengalaman.

IV. TATA USAHA DAN ATANI					
1.	Tanggal 3 Pebruari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.	Pengajuan Gaji induk bulan Maret 2015 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pegawai.	1. Bendahara Pengeluaran Pusat KLN 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat KLN 3. KPPN Jakarta V 4. Penandatanganan SPM 5. Petugas SPM	Berkas pengajuan Gaji induk bulan Maret 2015 berupa SPM dan ADK untuk diajukan ke KPPN Jakarta V.	Berkas Pengajuan Gaji induk bulan Maret 2015 untuk rekonsiliasi dan menunggu terbitnya SP2D.
2.	Tanggal 3 – 4 Pebruari 2015 di Ciawi.	Menghadiri Sosialisasi Perubahan AKUN Belanja Barang Persediaan dan Tata Cara Revisi Anggaran	Dibuka oleh Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan dihadiri oleh: 1. Bendahara Pengeluaran Pusat KLN 2. Penandatanganan SPM/Kasubbag TU dan Atani 3. Petugas /pejabat yang menangani keuangan lingkup Setjen	1. Terdapat penambahan AKUN baru 2. Perubahan segmen AKUN belanja tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014. 3. Kewenangan penyelesaian revisi anggaran tergantung ruang lingkup revisi anggarannya.	Memindahkan KUN belanja ATK
3.	Tanggal Rabu – Kamis, 11 – 12 Pebruari 2015, Bogor, Jawa Barat	Finalisasi Laporan Bulanan, Laporan Tahun 2014 dan LAKIP Pusat KLN	Pusat KLN	A. Hal-hal penting yang menjadi diskusi antara lain: 1. Draft Laporan Tahunan KLN Tahun 2014 diharapkan selesai paling lambat hari Jum'at, 13 Pebruari 2015 dan setiap bidang-bidang agar segera memperbaiki dan mengisi draft yang sudah ada.	Adanya format yang baku dan seragam untuk setiap laporan sehingga dapat mempercepat penyelesaian pengisiannya.

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk Laporan Bulanan yang dikirimkan kepada Biro Perencanaan disepakati tenggat waktu di Pusat KLN yaitu setiap tanggal 5 pada setiap bulan walaupun di Biro Perencanaan diterimanya sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya. 3. Untuk Laporan Bulanan yang disampaikan ke Biro Perencanaan mengikuti format baku Biro Perencanaan. 4. Laporan Mingguan yang masuk dari Bidang-bidang setiap di akhir pekan (hari jum'at) akan dikompilasi oleh Subag TU dan Atani sebagai bahan untuk Laporan Bulanan dan akan dikembalikan lagi ke Bidang-bidang untuk dimintakan tanggapan ataupun masukannya sebelum dikirimkan ke Biro Perencanaan. 	
4.	Tanggal 23 Pebruari 2015, Ged PIA Kementan	Sosialisasi Pengelolaan Arsip lingkup Pusat KLN Kementan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuka oleh Kasubag TU dan Atani 2. Sebagai narasumber adalah Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi 3. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing bidang lingkup Pusat KLN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusutan arsip (berdasarkan UU 43 Th. 2009): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindehan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan; b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak lagi memiliki nilai guna, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 	Biro Keuangan dan Perlengkapan akan memberikan bantuan anak PKL untuk menata arsip di Pusat KLN

				2. Disepakati bahwa setiap Sub Bidang di Pusat KLN bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsipnya masing-masing baik arsip aktif maupun arsip inaktif.	
5.	Senin, 2 – 27 Februari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.	Tawaran Pelatihan Mengenai Plant Variety Protection and DUS Testing Program , pada tanggal 18 Mei – 7 Juni 2015 di Korea. Penugasan pejabat/pegawai Kementerian Pertanian ke luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Negara RI 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kedutaan Besar Korea di Jakarta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Negara RI 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kedutaan Besar Negara terkait. 4. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 	<p>Telah ditawarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan.</p> <p>Telah diproses penugasan pejabat /pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 29 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 9 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 14 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 6 orang, program S3 sebanyak 2 orang.</p>	<p>Menunggu calon peserta.</p> <p>Berkas /dokumen perjalanan pejabat /pegawai ybs telah diproses ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh surat persetujuan Setneg RI dan ke Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh exit – permit serta Kedutaan Besar terkait untuk memperoleh visa.</p>

